

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Indonesia Resesi, Bagaimana Memitigasi UMKM?

Pemateri :

1. Catur Susanto, Kepala Bagian Rencana dan Program Kementerian Koperasi dan UMKM
2. Lishia Erza, Komite Pengembangan Wirausaha APINDO UMKM
3. M. Rifki Fadilah, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute

Moderator : Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

M. Rifki Fadilah, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute

- Rifki membuka pemaparannya dengan memperlihatkan tren di sektor ekonomi sebelum pageduk:
 - a. Bahwa pengangguran ada di angka yang stagnan di beberapa tahun terakhir. Pada 2020 sendiri, angka ini mencapai 6.820.000 jiwa.
 - b. Angka *actual* dan *minimum economic growth* menurun pada tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan angka 2.97 persen untuk *actual growth* dan 2.96 untuk *minimum economic growth* (MEG). Angka *actual growth* yang ada di atas MEG menunjukkan adanya geliat daya beli yang terus mengalami perbaikan.
 - c. Sedangkan, rasio gini di Indonesia pada 2020 untuk daerah *urban* ada di 0.392 dan 0.317 untuk daerah *rural*.
 - d. Untuk *poverty rate*, angka yang muncul di Indonesia dari catatan tahun 2019 adalah sebesar 9 persen.
 - e. Angka *desired* dan *actual inflation* juga stagnan, dengan 2.9 persen untuk *desired inflation* dan 3 persen untuk *actual inflation*.
- Di bagian selanjutnya, Rifki menyampaikan sejumlah krisis ekonomi yang sempat terjadi sebelum 2020:
 - a. Krisis di 1914-1918 dan 1939-1945: Disebabkan oleh perang dunia, berdampak pada stagnansi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang hadir bersamaan.
 - b. Krisis 1966: *hyperinflation* dan stagnansi yang terjadi di era Soekarno.
 - c. Krisis 1983: Terjadinya *twin deficit* pada *account & fiscal*.
 - d. Krisis 1998: Hadir di tingkat Asia. Depresiasi rupiah, kenaikan harga impor, kenaikan suku bunga nominal, dan stagnansi yang terjadi di akhir era Soeharto.
 - e. Krisis 2008: Spekulasi *mortgage (sub-prime)*, bank kolaps, dampak pada sektor industri, harga komoditi primer turun, dan stagnansi.
- Dari catatan krisis tersebut, Rifki menyatakan bahwa semua krisis ekonomi akan selalu terlewati. Dirinya merujuk pada model *business cycle* yang memperlihatkan perputaran fenomena tersebut: **titik puncak -> resesi (krisis) -> depresi -> the trough -> pemulihan -> ekspansi -> titik puncak.**
- Rifki melanjutkan pemaparan ke persoalan pandemi dan dampak yang ditimbulkannya pada sektor ekonomi. Dirinya merujuk pada kasus flu Spanyol di tahun 1918.

- Masuk ke kasus pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020, Rifki memperlihatkan sejumlah sektor yang terdampak karenanya. Mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan pemerintah daerah, UMKM, korporasi, dan insentif usaha.
- Rifki juga menunjukkan beberapa data di masa pagebluk seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 yang anjlok ke angka 2,97 persen; tingkat inflasi yang berada di angka 2,65 persen (*inti*), 0,28 persen (*administrated priced*), dan 2,52 (*volatile food*); indeks keyakinan konsumen yang berada di angka 84,8 persen pada Maret 2020; *Purchasing Managers Index* manufaktur Indonesia yang berada di angka 28.6 pada Mei 2020; *Survey Kegiatan Dunia Usaha* dan *Saldo Bersih Tertimbang* yang ada di angka -5,56 pada Januari 2020; dan posisi cadangan devisa yang berada di angka 130 Miliar USD pada Januari 2020.
- Rifki menyatakan bahwa Indonesia mengalami *short run aggregate supply shock* karena terserang oleh pandemi ini, khususnya pada barang yang *non-tradeable*.
- Karena kapital tidak bisa segera ditransaksikan, itulah kenapa keputusan sektor usaha akhirnya menasar ke *aggregate demand* atau variabel input-nya yaitu pekerja (*labor*).
- Kemudian Rifki lanjut menjelaskan dampak pagebluk ini pada sektor UMKM di Indonesia:
 - a. Data dari SMESCO (2020) menunjukkan adanya penurunan pendapatan pada sektor usaha dengan rincian sebagai berikut: *F&B* (8 persen); kerajinan tangan (14 persen); *fashion* (16 persen); dan Lainnya seperti resto, agrikultur, warkop, dan lainnya (62 persen).
 - b. Sementara, data KemenkopUKM (2020) memperlihatkan data dampak dari pagebluk sebagai berikut:
 - Penjualan = 58 persen
 - Keuangan = 23 persen
 - Distribusi = 15 persen
 - Bahan mentah = 4 persen
- Padahal, sektor UMKM menyerap tenaga kerja begitu besar. Catatan KemenkopUKM tahun 2018 memperlihatkan angka tersebut mencapai 116.978.631 orang tenaga kerja, angka ini menyentuh 97,01 persen tenaga kerja di Indonesia.
- Menjelang akhir pemaparan, Rifki menyuguhkan konsep penanganan krisis dengan merujuk pada J. M. Keynes (1883-1946) dan J. Schumpeter (1883-1950). Dirinya mengatakan bahwa UMKM harus diikutsertakan dalam sistem keuangan nasional agar mendapatkan dapat mendapatkan modal dari bank. Hal tersebut patut diikuti dengan pendampingan pada pelaporan keuangan. Terakhir, panduan teknis juga patut diberikan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Lishia Erza, Komite Pengembangan Wirausaha APINDO UMKM

- Lishia memulai pemaparannya dengan memberi ilustrasi jumlah pelaku usaha mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di Indonesia. Dibanding negara lain, komposisi usaha di Indonesia menunjukkan *gap* yang paling besar. Hal ini yang membuat kondisi pandemi memberikan dampak besar pada sektor UMKM, karena jumlah besar pada usaha mikro tidak dibarengi dengan pengorganisasian yang solid.
- Menurut Lishia, sasaran bantuan seharusnya ditujukan pada usaha kecil dibandingkan dengan usaha mikro. Sebab, usaha kecil memiliki potensi yang lebih menjanjikan dan tidak memakan banyak sumber daya seperti usaha mikro.
- Dirinya melanjutkan bahwa dampak dari pandemi tidak hanya menasar pada sektor makanan, namun juga sektor pendidikan seperti tempat kursus.

- Lishia juga memperlihatkan dampak pandemi secara spesifik ke sektor pariwisata, di mana dampak tersebut menjalar mulai dari *tour guide*, hotel, *laundry*, hingga destinasi pertunjukan merasakan kerugian tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa dampak pandemi pada sektor UMKM memang sangat dinamis dan kompleks.
- Beberapa persoalan yang membedakan krisis ekonomi di 2020 yang menimpa UKM menurut Lishia:
 - *Inventory* yang tidak bisa dilepas membuat *cashflow* tertahan
 - Hal tersebut membuat *rate* yang disediakan bank menjadi tinggi dan *financial viability* menurun
 - UKM punya kecenderungan tidak mampu mengubah utangnya menjadi *trade payables* untuk mitigasi resiko keuangan
 - Perubahan perilaku konsumsi membuat model *cash-to-cash* di usaha mikro tidak terwujud, memunculkan *household spending*
 - Pelaku UKM tidak memitigasi transformasi ke platform *e-commerce* yang sering mensyaratkan biaya transaksi
 - Akhirnya, tantangan menasar pada kecepatan birokrasi perbankan karena stimulus tidak cukup disalurkan melalui *payroll relief*
- Apindo bersama ILO sempat melakukan survei terkait layanan dan dukungan apa yang dibutuhkan pelaku usaha UKM, dan *working capital* yang stabil adalah hal yang paling dibutuhkan
- Dalam konteks Indonesia, pengontekstualisasian kebutuhan tersebut dihadapkan oleh tantangan berupa nilai bantuan yang hanya Rp 2,4 juta. Hal tersebut dianggap masih belum menutupi modal kerja yang dibutuhkan.
- Sektor UKM yang *bankable* ternyata minoritas di kisaran angka 6 persen untuk mirko, 6 persen untuk kecil, dan 8 persen untuk menengah. Padahal populasi UKM tersebut justru paling besar.
- Problem lain adalah penggunaan produk keuangan penguatan rantai pasok yang harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jika memang yang dibutuhkan adalah bantuan operasional, maka hal yang bersifat taktis (seperti pengadaan mesin) akan membutuhkan kebijakan produk yang berbeda
- Model investasi yang musnah selama pandemi memunculkan pertanyaan, bentuk pemulihan seperti apa yang perlu diterapkan di Indonesia? Hal ini pun kian kompleks karena pemetaan PDB menghadirkan skala prioritas yang berbeda terkait dengan aktivitas yang bisa dilakukan di masa pandemi.
- Faktor kompetitif Indonesia juga menjadi faktor lain, misalnya soal *term* pembayaran. Di mana kemampuan Indonesia untuk menahan *cashflow* kalah saing dengan negara kuat yang mampu bertahan lebih lama.
- Tiga hal yang digarisbawahi oleh Lishia terkait permasalahan yang dihadapi saat ini:
 - Bahwa kita menghadapi era penuh ketidakpastian, sehingga
 - Kebijakan konvensional menjadi tidak relevan. Kolaborasi, tidak sporadis, dan jangka panjang adalah elemen penting untuk bisa diterapkan di masa pandemi
 - Perdebatan dalam mendahulukan fiskal atau moneter
- Dalam memitigasi sektor UKM, ada 9 refleksi strategis yang biasanya dilakukan agar bisa selamat:
 - Mencari modal kerja
 - Meningkatkan arus kas
 - Meningkatkan jumlah pelanggan ditambah *upselling*
 - Bermitra dengan bisnis lain
 - Pengurangan biaya
 - Menggencarkan marketing

- Kondolidasi kredit untuk menekan pengeluaran
- Dana darurat
- Berkomunitas untuk *peer learning* dalam menanggulangi resesi
- Dalam konteks Apindo, ada tiga misi penyelamatan yang diutamakan:
 - Memberi perlindungan terhadap kesehatan karyawan, yang bekerja di lingkup UKM
 - Menjaga kelangsungan operasional bisnis UMKM yang terdampak, misalnya mencari strategi untuk menanggulangi dampak pandemi
 - Manajemen dampak finansial. Mengelola dampak negatif finansial di badan usaha skala UMKM
- Fasilitas keuangan untuk UKM juga perlu mempertimbangkan variable risiko keuangan dan dampak COVID-19, sehingga muncul empat kuadran di dalamnya:
 - Risiko keuangan tinggi, dampak COVID-19 ringan: restrukturisasi kredit investasi dan kredit modal kerja
 - Risiko keuangan rendah, dampak COVID-19 ringan: modal kerja dan kebutuhan kredit investasi
 - Risiko keuangan tinggi, dampak COVID-19 berat: BLT agar tetap hidup
 - Risiko keuangan rendah, dampak COVID-19 berat: kredit modal kerja, kredit investasi, dan perbaikan akses pasar
- 8 Rekomendasi kebijakan dari Apindo terkait SDM, Kelembagaan/Kebijakan, dan Teknologi
 - Inklusi dan literasi
 - Stimulus
 - Mekanisme distribusi risiko ke seluruh rantai pasok
 - Infrastruktur kelembagaan yang mendorong inovasi
 - 2 Fase penguatan keuangan:
 - Keberlanjutan usaha yang lemah namun masih berjalan
 - Re-starting usaha yang sudah tutup
 - Acuan kredit skoring secara nasional
 - Dana pemerintah sebagai garansi *trade insurance*
 - Aspek keberlanjutan dalam menjalankan usaha

Catur Susanto, Kepala Bagian Rencana dan Program Kementerian Koperasi dan UMKM

- Kelompok usaha mikro di Indonesia menjadi sektor yang khas, sebab negara lain hanya berhenti hingga kelompok kecil saja. Bahkan, kelompok mikro sendiri memiliki turunan lanjutannya seperti ultra mikro atau sub mikro. Hal ini sangat mendominasi struktur pelaku usaha di Indonesia saat ini.
- Namun, kontribusi kontribusi dari kelompok ini justru menghadirkan paradoks dibanding kelompok kecil, menengah dan besar. Sebab, kelompok mikro hanya berkontribusi sebanyak 1,22 persen pada ekspor di Indonesia
- Catur menjelaskan dampak COVID-19 terhadap UMKM:
 - 50 persen UMKM menutup usahanya
 - 88 persen usaha mikro tidak memiliki kas dan tabungan sehingga terdampak serius oleh pandemi
 - Lebih dari 60 persen usaha mikro dan kecil melakukan efisiensi dengan memutus tenaga kerjanya

- Rendahnya angka UMKM yang terafiliasi platform digital (13 persen) dari keseluruhan populasi UMKM menjadi problem serius yang perlu dimitigasi. Padahal pendekatan daring menghadirkan peluang yang besar
- Dari PEN, ada lima skema perlindungan dan pemulihan KUMKM dengan total anggaran mencapai Rp 123,46 T. Skema ini ditujukan sebagai bantuan sosial, insentif pajak, relaksasi, restrukturisasi kredit, dan perluasan pembiayaan modal kerja. Hal ini dilakukan secara masif dalam durasi jangka pendek, demi mengantisipasi dampak luar biasa dari pandemi
- Catur juga menjelaskan status program PEN KUMKM yang menunjukkan perkembangan yang cukup progresif, yang realisasinya mencapai 68,01 persen
- Salah satu programnya adalah bantuan presiden produktif bagi pelaku UMKM, yang menarget 12 juta pelaku UMKM yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi di perbankan. Hal ini sudah terealisasi pada 9,9 juta pelaku UMKM
- Pemetaan UMKM menjadi diperlukan, untuk mengintegrasikan sektor dan subsektor yang ada di banyak kementerian. Hal ini akhirnya membutuhkan upaya kolaboratif antara kementerian. Hasil pemetaan di KemenkopUKM menunjukkan bahwa pertanian justru menjadi sektor usaha yang masuk sebagai *potential winners*
- KemenkopUKM juga sudah memetakan bahwa 91,8 persen pelaku UKM mengharapkan pinjaman tanpa bunga/tanpa agunan
- Sementara, 90 persen UMKM memerlukan pembiayaan untuk memulai usaha, dan 89,5 persen pelaku UMKM membutuhkan BLT atau hibah
- Pelaku UMKM juga harus menangkap pergeseran perilaku konsumen dan pasar di era adaptasi kebiasaan baru seperti sekarang
- KemenkopUKM memiliki cetak biru untuk bisa merubah struktur piramida UMKM Indonesia yang didominasi mikro menjadi lebih proporsional di tingkat kecil dan menengah. Salah satunya melalui intervensi pemerintah
- Intervensi pemerintah dalam pengembangan UMKM ini dilakukan mulai dari Hulu ke Hilir
 - Hulu: terkait dengan pembiayaan. Dimulai dengan memetakan UMKM yang *bankable* dan *unbankable*
 - Hilir: membuka akses pasar. Salah satunya melalui digitalisasi UMKM.
 - Middle set: adanya capacity building ditingkatkan bagi pelaku UMKM

FORUM DISKUSI

1. Arfianto - TII

Untuk Lishia:

- a. Apakah implementasi kebijakan dari pemerintah betul-betul dirasakan oleh pengusaha? Dan apakah omnibus law dibutuhkan oleh pelaku UMKM?
- b. Dalam kondisi pandemi yang memunculkan usaha baru, apa upaya yang dilakukan Apindo untuk merangkul kalangan tersebut?

Untuk Catur:

Bagaimana proses implementasi kebijakan, apakah tidak tumpang tindih dengan kebijakan kementerian lain?

2. Adinda – Suara Kebebasan/TII

Untuk Lishia:

Selain berjejaring dengan komunitas, apa lagi yang dilakukan Apindo? Utamanya dalam merespon kehadiran UMKM.

Untuk Catur:

Apakah kehadiran omnibus law Ciptaker akan merangsang kehadiran UMKM baru?

Tanggapan

1. Lishia menjawab Arfianto

- 1) Penguasa membutuhkan proses perizinan yang terintegrasi dan lebih sederhana. Terlepas dari perdebatan dari setiap kluster-kluster yang yang konsern dengan segala macam isu di dalam omnibus law Ciptaker.
- 2) Implementasinya memang seringkali tumpang tindih, karena tidak semua kementerian memiliki instrumen di daerah.
- 3) Apindo bekerja dengan banyak komunitas usaha sebagai upaya merangkul pelaku UMKM seluas mungkin. Seperti melalui UKM Indonesia, Sahabat UMKM, Plan International, dan *Diplomat Success Challenge*.

2. Catur menjawab Arfianto

Perizinan berusaha yang tersebar di beberapa kementerian memang menghadirkan kesulitan berusaha. Bisa dikatakan, omnibus law Ciptaker dan PP terkait UMKM menjadi instrumen untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasikan persebaran dan tumpang tindihnya hal tersebut.

3. Lishia menjawab Adinda

Ada beberapa bidang kerja di Apindo, salah satunya advokasi yang akan berjejaring secara intensif dengan pemerintah. Termasuk dalam memastikan tidak adanya ketentuan-ketentuan yang justru tidak menguntungkan pelaku UMKM.

4. Catur menjawab Adinda

Konteks intervensi pemerintah ini memang menysasar ke kalangan mikro dan kecil. Pemerintah akan konsern ke kelompok tersebut, karena di level menengah sudah bisa dilepas secara mandiri di pasar. Penataan yang dilakukan pada kelompok mikro hanya bersifat pendampingan sehingga layak mendapatkan izin. Sementara kelompok kecil akan lebih dititikberatkan di soal perizinannya.

Catatan :

1. **Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIA FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
2. **Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

~ TERIMA KASIH ~